

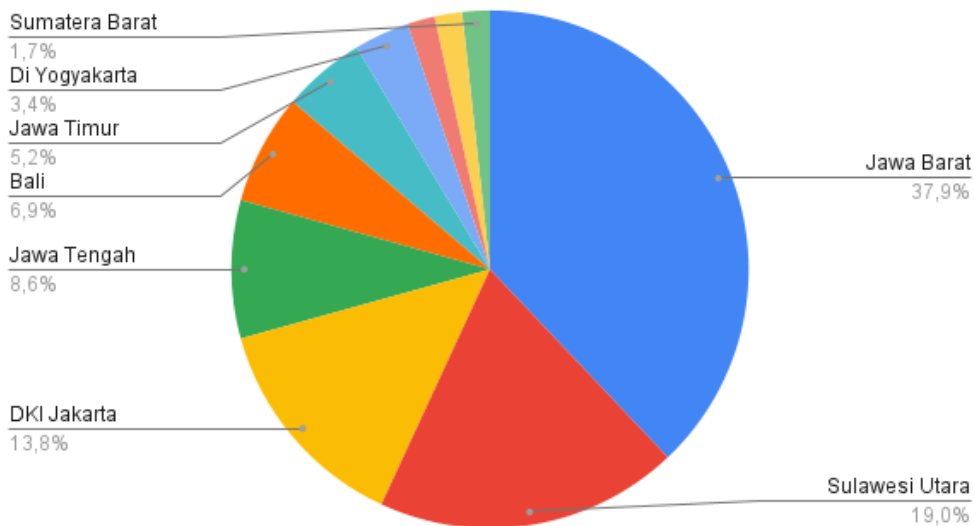
Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid IV Periode 1 Juni 2021 - 29 Juni 2021

Dalam rentang 1 Juni 2021 - 29 Juni 2021, LaporanCovid-19 (melalui [Google form](#)) menerima 95 laporan tentang dana insentif yang tidak dibayarkan, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

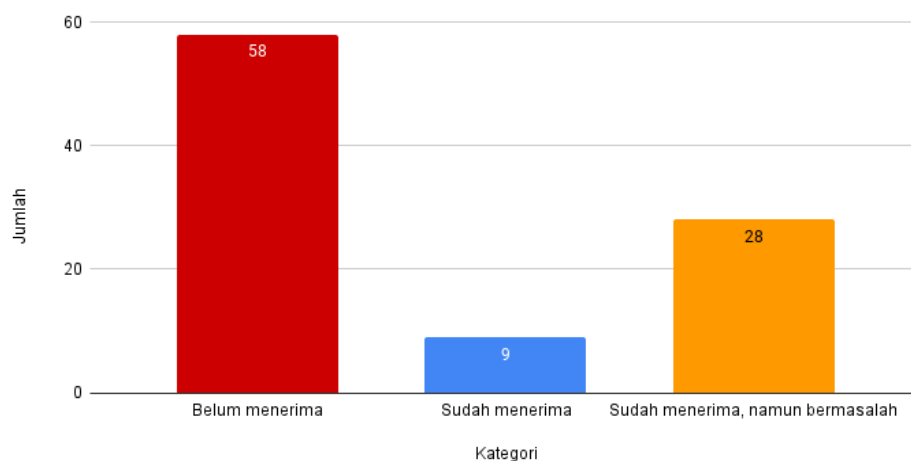
Laporan ini didapatkan dari para tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di berbagai provinsi, di antaranya: Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat.

Wilayah Jawa Barat, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta menjadi 3 wilayah dengan keluhan mengenai insentif terbanyak yang dilaporkan oleh para nakes.

Sebaran Laporan Insentif berdasarkan Provinsi (1 Juni 2021 -29 Juni 2021)



Jenis Masalah Insentif
Periode 1 Juni 2021- 29 Juni 2021



Sebanyak 58 nakes melaporkan, belum menerima insentif sama sekali sejak bertugas. Selain itu, terdapat 28 nakes yang mengaku pernah menerima, namun insentif tidak kembali didapatkan pada periode berikutnya atau menerima hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Berikut beberapa laporan diterima oleh LapoCovid-19 mengenai penyaluran insentif yang tidak teratur:

“Sudah terima sampai bulan desember 2020 sebesar 7.500.000. Bulan januari 2021 hingga sekarang belum ada.” (15 Juni 2021)

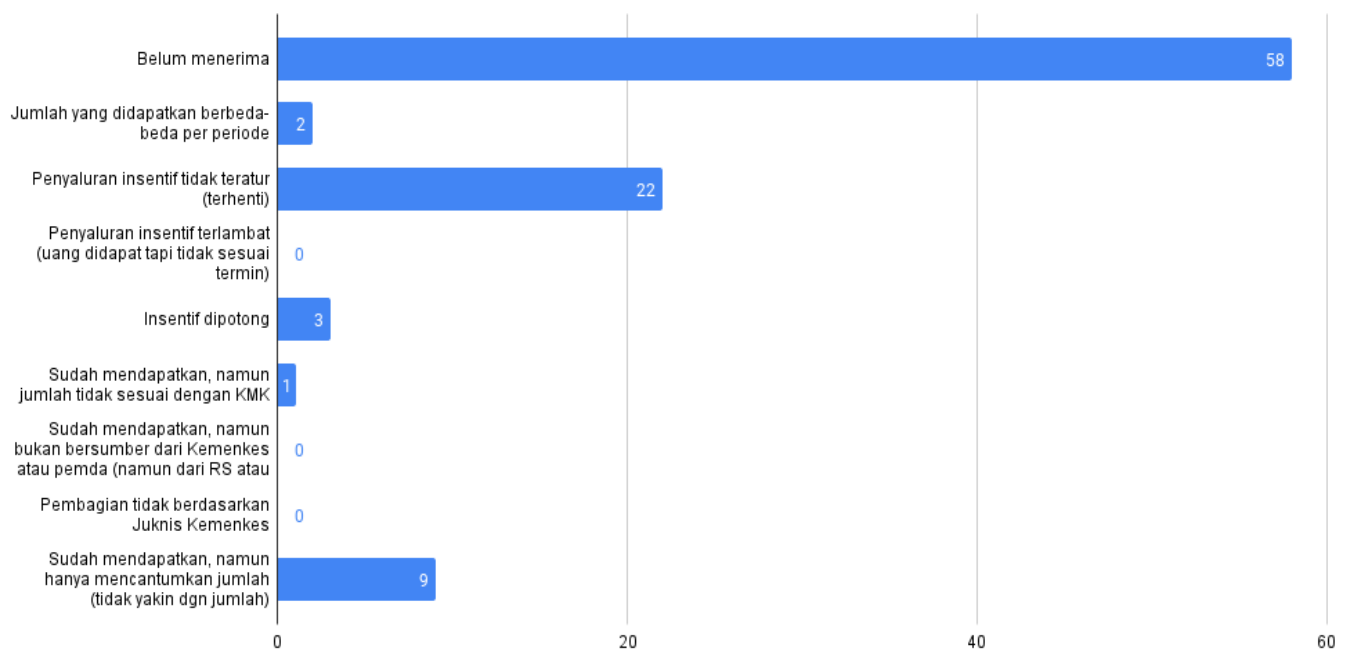
“Tidak menentu kadang 1 juta rupiah, tapi sampai sampai saat ini blm menerima insentif pada bulan November 2020” (3 Juni 2021)

“Januari sampai April 2021 sudah turun, Desember 2020 tidak turun” (4 Juni 2021)

Masalah lain yang muncul dari mereka yang sudah menerima adalah pemotongan insentif yang beragam, ada yang hingga 50 persen dari jumlah insentif yang semestinya didapatkan.

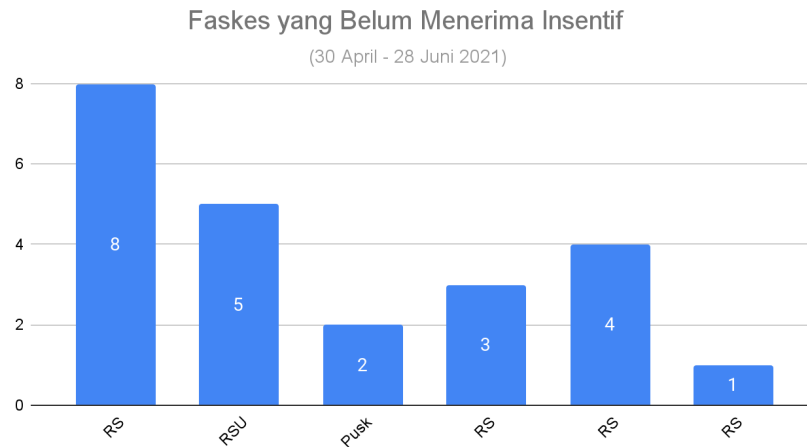
“[Mendapatkan] 30 juta untuk akhir tahun 2020, tapi harus mengembalikan 13 juta sekian tanpa diberitahukan alasan” (8 Juni 2021)

“Insentif diambil oleh manajemen RS untuk diberikan kepada bagian lain dan ini sudah terjadi beberapa bulan” (25 Juni 2021)”



Pada akhir bulan April hingga Juni 2021, LaporanCovid-19 melalui kanal aduannya ([Whatsapp Bot](#)), kembali menerima 18 laporan terkait insentif. Sebagian besar laporan itu berasal dari nakes di RS umum di daerah (RSUD), seperti di Kabupaten Kuningan, Manado, dan puskesmas di Makassar. Salah satu persoalannya, dana belum bisa dicairkan karena permasalahan administrasi di Dinas Kesehatan.

Selain itu, permasalahan insentif juga dilaporkan oleh petugas kesehatan di bawah naungan Rumah Sakit Polri di beberapa kota daerah Jawa Tengah.



Sebaran provinsi RS yang belum mendapatkan insentif

